

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Persepsi

1.1 Pengertian Persepsi

Menurut David Matsumoto (2008:59), “sensasi atau persepsi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut”. Secara lebih spesifik, sensasi biasanya mengacu pada stimulasi atau perangsangan nyata pada organ-organ indera tertentu seperti mata (sistem visual), telinga (sistem pendengaran atau auditori), hidung (sistem penciuman atau olfaktorik), lidah (sistem pengecap atau rasa), dan kulit (sentuhan). Sedangkan persepsi biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata, dan ditafsirkan. Pendek kata, persepsi mengacu pada proses dimana informasi inderawi diterjemahkan menjadi sesuatu yang diterjemahkan kemudian menjadi sesuatu yang bermakna.

Menurut Davidoff yang dikutip oleh Walgito (2010:89) “bahwa yaitu Persepsi merupakan aktivitas yang *intergrated* dalam diri

individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain”.

Selain itu pendapat lain dikemukakan oleh Walgito yang dikutip oleh Sunaryo (2004:93) ”persepsi adalah proses perorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu”.

Pengertian persepsi yang dikemukakan oleh Young (2010: 1) adalah “Aktifitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan pengindra tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan di olah bersama-sama dengan hal-hal yang telah di pelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain”.

Berdasarkan pandangan di atas, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga di sebut proses sensoris. Namun proses situ tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus itu di teruskan dan proses selanjutnya

merupakan proses persepsi. Dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Pengertian persepsi yang dikemukakan oleh Rivai (2003:231) adalah “suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan mentafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka”. Dari pendapat yang diungkapkan Rivai dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dialami individu di dalam mengolah kesan-kesan yang diperoleh oleh indera dan dapat menghasilkan sesuatu yang berharga.

Mengacu pada pendapat dari berbagai tokoh di atas, maka persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan seseorang terhadap objek tertentu. Persepsi merupakan suatu proses penggabungan yang dimulai dari pengindraan, pengenalan objek dan pengalaman masa lalu. Hasil dari persepsi bisa berupa tanggapan atau penilaian seseorang terhadap suatu objek yang berbeda-beda dari setiap individu.

1.2 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi yang dikemukakan seseorang tidak timbul begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Krech dan Richard. S yang dikutip oleh Rahmat (2009:59) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

a) Faktor fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas :

1. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi
2. Kesiapan mental
3. Suasana emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi
4. Latar belakang budaya

b) Faktor Struktural

Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem syaraf individu, yang meliputi :

- 1) Kemampuan berfikir
- 2) Daya tangkap duniawi
- 3) Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.

Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat. Menurut yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono (2009:90), seseorang individu bisa dikatakan

mengadakan persepsi terhadap suatu objek apabila memenuhinya beberapa syarat sebagai berikut :

1) Perhatian

Biasanya seseorang tidak akan menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada suatu atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi

2) Set

Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seseorang pelari akan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan disaat itu ia harus mulai berlari.

3) Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4) Sistem Nilai

Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat juga berpengaruh pada persepsi.

5) Ciri Kepribadian

Misalnya A dan B bekerja disebuah kantor, si A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si b yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai orang yang bisa diajak bergaul seperti orang yang lain.

6) Gangguan kejiwaan

Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa tokoh di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapatlah dipahami bahwa pembentukan persepsi seseorang tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya persepsi. Pembentukan persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal semata, tetapi juga dari faktor-faktor eksternal yang datangnya dari luar individu.

1.3 Proses Terjadinya Persepsi

Selain itu, Walgito (2010:76), menyatakan proses persepsi berlangsung sebagai berikut :

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terkaji dalam otak ini merupakan proses psikologis.

Beberapa pendapat para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah

adanya suatu objek tertentu kemudian disalurkan oleh alat indera ke otak dan kemudian otak mengolahnya menjadi menjadi suatu persepsi dari apa yang diterima oleh alat inderanya.

2. Siswa

2.1 Pengertian Siswa

Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan social, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif.

a. Pendekatan sosial.

siswa adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sebagai anggota masyarakat, dia berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang lebih luas. siswa perlu disiapkan agar pada waktunya mampu melaksanakan perannya dalam dunia kerja dan dapat menyesuaikan diri dari masyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan di dalam lingkungan masyarakat sekolah. Dalam konteks inilah, siswa melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai social yang terbaik dapat ditanamkan secara

bertahap melalui proses pembelajaran dan pengalaman langsung.

b. Pendekatan Psikologis.

Siswa adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Siswa memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti: bakat, inat, kebutuhan, social-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah. Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara menyeluruh menjadi manusia seutuhnya. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelegensi, sosial, emosional, spiritual, yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

c. Pendekatan edukatif, pendekatan pendidikan menempatkan siswa sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.

2.2 Karakteristik Dan Potensi Siswa

Siswa atau pelajar sering kali disebut sebagai generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa berada ditangan para pelajar ini. Siswa adalah bagian dari masyarakat yang sangat penting perannya dalam kemajuan bangsa. Anggapan tersebut dibenarkan

karena siswa sebagai generasi muda yang sedang menuntut ilmu pendidikan di lembaga pendidikan diharapkan mampu mengamalkan semua ilmu yang mereka peroleh selama di bangku sekolah ke kehidupan nyata.

Siswa adalah sosok individu yang mudah sekali terpengaruh atau terprofokasi. Segala informasi yang baik atau pun buruk mudah sekali terkadang diterima kebenarannya dengan siswa, dengan demikian peran orang dewasa dan lingkungan menjadi penting guna mendidik siswa menjadi generasi muda yang berkualitas.

3. Tinjauan Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Aspirasi Politik

3.1 Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat suatu kelompok atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik atas dasar kepentingan kelompok.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengemukakan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain itu didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum”.

Regulasi tentang cara mengemukakan pendapat dimuka umum merupakan inti muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Undang-Undang ini merupakan wujud perlindungan yang diberikan negara terhadap setiap warga negara yang ingin menyampaikan aspirasinya didepan umum.

Mengemukakan pendapat dimuka umum seperti demonstrasi tentu saja ada tata caranya. Tata cara mengemukakan pendapat di muka umum antara lain ialah penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri pemberitahuan harus disampaikan oleh pemimpin atau penanggung jawab, tiap seratus orang pelaku harus ada 5 orang penanggung jawab pemberitahuan selambat lambatnya 3X24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat. Surat pemberitahuan untuk mengemukakan pendapat memuat hal-hal antara lain :

- a. Maksud dan tujuan.
- b. Tempat
- c. Lokasi dan rute
- d. Waktu dan lama.

- e. Bentuk.
- f. Penanggung jawab
- g. Nama dan alamat organisasi
- h. Kelompok atau perorangan
- i. Alat peraga yang digunakan
- j. Jumlah peserta.

Kewajiban Polri setelah menerima surat pemberitahuan adalah :

- a. Segera memberi tanda terima pemberitahuan.
- b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan untuk mempertimbangkan aktor-faktor yang dapat mengganggu keamanan ketertiban dan kedamaian kegiatan.
- c. Berkoordinasi dengan pimpinan lembaga/instansi yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.
- d. Mengamankan tempat, lokasi dan rute.

3.2 Demonstrasi di Indonesia.

Demonstrasi di Indonesia sudah dikenal luas. Indonesia merupakan negara demokratis, dimana kebebasan berpendapat setiap warga negara dijamin oleh negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti demonstrasi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sebagai bentuk menyuarkan aspirasi mereka dimuka umum. Namun sangat disayangkan berlangsungnya demonstrasi di Indonesia selalu berujung dengan anarkis, terjadinya bentrok fisik antar

demonstran dengan aparat yang berwenang menjaga keamanan dalam berlangsungnya demonstrasi pun sering kali terjadi.

Pelaku demonstrasi sering kali tidak mematuhi prosedur berlangsungnya demonstrasi agar berjalan tertib. Pemahaman tentang materi apa yang diorasionkan dalam demonstrasi pun terkadang kurang dikuasai oleh para demonstran menjadi salah satu penyebab demonstrasi berlangsung dengan tidak ideal pula. Pada umumnya isu yang sedang berkembang dimasyarakat dan belum jelas kebenarannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tidak dipahami dan dicari kebenarannya terlebih dahulu oleh masyarakat. Mendengar isu tersebut masyarakat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan itu kebijakan yang benar akan dijalankan oleh pemerintah dengan demikian pemahaman masyarakat itu pun menjadi penyebab terjadinya demonstrasi yang terkadang berlangsung anarkis di Indonesia

3.3 Demonstrasi Sebagai Saluran Aspirasi Politik

Demonstrasi adalah hak asasi dan ekspresi politik masyarakat yang dijamin konstitusi yang ditujukan untuk menyampaikan protes dan ketidak sepakatan terhadap pemerintah. Aksi demonstrasi ini merupakan salah satu saluran dan protes komunikasi dalam cara menyampaikan pesan atau ketidak puasan terhadap suatu kebijakan publik, kepemimpinan politik atau janji

politik. dari sisi politik ujuk rasa atau demonstrasi menjadi salah satu partisipasi menyuarakan aspirasi politik alternatif.

Namun demikian demonstrasi yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk aspirasi politik sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif oleh para penguasa dan pilihan utama bagi para penentangannya. Rakyat adalah pendukung utama terjadinya dorongan untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi penting sebagai faktor pendorong politik rakyat. Para demonstran menganggap informasi dan pesan-pesan dari editor surat kabar, artikel kolom surat kabar, berita koran, radio, *talk show*, berita radio, dunia maya (*internet*), berita TV mempunyai pengaruh terhadap keputusan berpartisipasi dalam demonstrasi yang dilakukan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Sarana penyampaian aspirasi masyarakat dalam hal ini demonstrasi juga dapat digunakan sebagai sarana penyampaian sarana penyampaian aspirasi masyarakat manakala saluran konstitusional dianggap kurang efektif atau tak berguna. Dengan kata lain apabila pemerintah memiliki suatu kebijakan tentang politik yang dirasa kurang memihak kepada rakyat maka rakyat akan berdemonstrasi untuk mengeluarkan aspirasinya.

4. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik

4.1 Pengertian Politik

Menurut Maran (1999) “politik merupakan studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Dengan kata lain politik merupakan bermacam-maca kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan”.

Definisi secara sederhana tetapi padat dapat dilihat dari pendapatnya Surbakti (1999) “mengatakan bahwa konsep politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu”.

Dapat dipahami bahwa ilmu politik selain mempelajari tentang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, juga membicarakan tentang berbagai upaya perebutan mencari dan mempertahankan kekuasaan.

4.2 Pengertian Partisipasi Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Jadi, Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Syarbaini (2002:69) “mendefinisikan partisipasi politik adalah :kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah”.

Definisi lebih jelas dapat dilihat dari pendapat Surbakti, (1999:118) adalah “kegiatan warga negara biasa dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan”. Kegiatan yang dimaksud meliputi antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, mengajukan surat, melakukan kontak tatap muka, demonstrasi, membuat huru-hara, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, kudeta, revolusi dan pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum.

4.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Herichayono (1990:200), ada lima bentuk partisipasi politik yaitu :

- a. Aktifitas pemberian suara atau foting merupakan suatu bentuk yang paling umum di gunakan dari masa lampau sampai sekarang. Pemberian suara ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang paling luas tersebar diberbagai masyarakat. Artinya hampir semua sistem politik baik itu demokrasi atau otoriter terdapat voting atau pemberian suara. Dimana semua masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif memberikan suara dalam pemilu dan duharapkan aktif memberikan masukan masukan atau saran terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu foting merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat.

- b. Diskusi politik, merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh sekelompok warga negara untuk membicarakan dan memecahkan persoalan-persoalan politik negaranya. Artinya dalam suatu masyarakat biasanya sering diadakan rapat umum yang membicarakan masalah-masalah tersebut bila dipecahkan maka diperlukan adanya keaktifan memecahkan masalah dalam diskusi dan juga kehadiran masyarakat dalam musyawarah.
- c. Kegiatan kampanye merupakan bentuk praktik dalam bentuk yang pertama. Biasanya dilaksanakan menjelang pemilu. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat memberikan dukungan kepada suatu partai. Untuk itu agar kegiatan kampanye dapat berhasil dan memperoleh banyak dukungan maka diperlukan kehadiran masyarakat dan keaktifan dalam berkampanye.
- d. Bergabung dalam kelompok kepentingan dengan tujuan lebih memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan yang berperan dalam kehidupan-kehidupan politik sepanjang sejarah. Artinya sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik.
- e. Melakukan individu-individu dengan pejabat-pejabat politik maupun administrasi komunikasi yang meliputi perangkat desa, keikutsertaan dalam mempengaruhi kebijakan desa.

Mengacu pada pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa anggota-anggota yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan-kegiatan bersama tersebut maka kebutuhan dan kepentingan akan tersalurkan atau diperhatikan. Sementara menurut Huntington dan Nelson (1994:16-18) membagi bentuk-bentuk partisipasi menjadi:

a) Kegiatan pemilihan

Yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif dan eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

b) *Lobbying*

Yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka yang menyangkut orang banyak atau kepentingan masyarakat.

c) Kegiatan organisasi

Yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pemimpinnya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

d) Mencari koneksi (*contacting*)

Yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna

mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang.

e) Tindakan kekerasan (*violence*)

Yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik manusia atau harta benda seperti teror, kudeta dan pemberontakan.

Mengacu pada bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson diatas, partisipasi politik dapat berupa partisipasi yang bersifat individual seperti keterlibatan individu pada organisasi, pemilihan umum, dan mencari koneksi serta partisipasi yang sifatnya kolektif/kelompok misalnya (*lobbying*) dan tindakan kekerasan (*violence*). Selain itu partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi dalam bentuk konvensional dan non-konvensional.

a. Partisipasi dalam bentuk konvensional

- 1) Pemberian suara.
- 2) Diskusi politik.
- 3) Kegiatan kampanye.
- 4) Membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan.
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik.
- 6)

b. Partisipasi dalam bentuk non-konvensional

- 1) Pengajuan petisi.
- 2) Berdemonstrasi, mogok dan konfrontasi.
- 3) Tindakan kekerasan dalam harta benda ; perusakan, pemboman, pembakaran.
- 4) Tindakan kekerasan kepada manusia ; penculikan, pembunuhan, pembantaian, perang dan revolusi.

4.4 Tujuan dan Fungsi Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994:4) mengemukakan “bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah”. Partisipasi yang dimaksud itu dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dukungan yang efektif bagi suatu pergeseran yang besar di dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi atau sosial biasanya berasal dari partisipasi kolektif yang terorganisasi yang dapat tampil dalam berbagai bentuk.

Sastroatmojo (1995:86) “mengemukakan bahwa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi, fungsi yang pertama partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Fungsi yang ke dua partisipasi politik

masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Fungsi lainnya sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan”.

Pendapat Sudijono Sastroatmojo diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pada hakikatnya berfungsi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan program-program pembangunan. Robert Lane dalam Sudijono Sastroatmojo dalam studi tentang keterlibatan politik mengatakan bahwa partisipasi memiliki empat fungsi yaitu :

- a) Sebagai sarana publik untuk mengejar sarana ekonomi. Hal ini disebabkan partisipasi politik sering kali muncul sebagai bentuk alat yang menjadikan wilayah politik digunakan untuk memperlancar usaha ekonomi ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b) Sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Partisipasi politi digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri serta meningkatkan status sosial dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang

mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktifitas politik

- c) Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus. Orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pekerjaan, tender dan mendapatkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan mendorong partisipasi dalam politik.
- d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu dalam hal ini kegiatannya ditujukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain sebagai sosok yang penting dan dihargai serta kepuasan-kepuasan atas target yang dicapai.

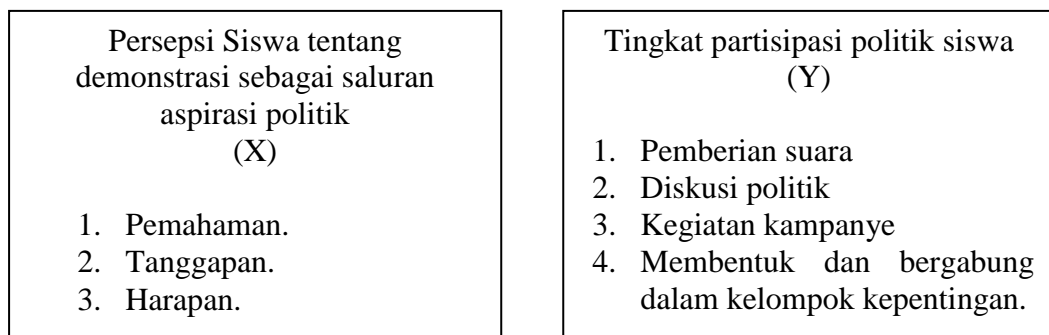
Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat dimengerti bahwa seseorang berpartisipasi dalam politik didasarkan pada pertimbangan yang pada umumnya bersifat individual

B. Kerangka Pikir

Pengetahuan tentang politik seharusnya harus menjadi konsumsi masyarakat dengan baik dan merata. Dari semua lapisan masyarakat tentunya dengan tidak melihat status sosial harusnya pengetahuan tentang politik bisa dikuasai maka dengan itu mereka bisa meningkatkan

partisipasi politik. Pengetahuan tentang politik sudah seharusnya disosialisasikan dengan baik untuk semua kalangan masyarakat, dimulai dari lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki pengaruh besar untuk mensosialisasikan politik, guna mendidik siswa menjadi pelaku politik yang baik serta mendidik siswa untuk meningkatkan partisipasi politik. Siswa sebagai generasi muda harus memiliki bekal ilmu yang baik tentang politik sebagai pelaku politik pemula.

Untuk menyederhanakan mengenai pembahasan demonstrasi sebagai saluran aspirasi politik dan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi politik dibuat kerangka pikir sebagai berikut :



Bagan I. Kerangka Pikir